

**PENGARUH KINERJA DAN KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
BELANJA MODAL (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA)**

Syurmita

Universitas Al Azhar Indonesia

Isma Rizky Septiani

Universitas Al Azhar Indonesia

ABSTRACT

This research is aimed to examine the factors that affect capital expenditure on Municipalities of Indonesia. The independent variables are local dependency, Effectiveness rate, Contribution BUMD, Efficiency rate, SiLPA and total area. The dependent variable is Capital Expenditure. Population in this research is all local governments districts/cities of Indonesia for year 2012. The analytical method used is double linear regression. The data used is Budget Realization Statements of districts/cities of Indonesia which had been audited by BPK. The results of this research show that effectiveness rate, Efficiency rate, Contribution BUMD has no effect on capital expenditure. Local dependency has negative significant effect on capital expenditure, SiLPA has positive significant effect on capital expenditure, total area has positive significant effect on capital expenditure. Adjusted R square value obtained in this research is 28,5%.

Keyword: Capital Expenditure, SiLPA, Effectiveness, Efficiency, Contribution BUMD, Total Area, Local dependency

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang dilandasi perubahan paradigma sentralisasi ke paradigma desentralisasi tidak hanya memperkuat otoritas pemerintah daerah serta menghasilkan kemajuan demokrasi di tingkat lokal, akan tetapi juga pemberdayaan berkelanjutan baik pemerintah daerah provinsi, maupun daerah pemerintah Kabupaten/Kota. Di bidang ekonomi, otonomi daerah telah memperkokoh sendi-sendi perekonomian daerah dengan semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur yang menggerakkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal serta peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat (Kusumah dan Emhas, 2012).

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari sisi keuangan negara, adanya desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pelayanan fasilitas publik daerah dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti pengelolaan anggaran harus ditetapkan dengan disiplin serta pengalokasian anggaran harus tepat sasaran yaitu diperuntukkan bagi kepentingan publik, seperti belanja modal.

Belanja modal merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Mahsun, Sulistiyowati, Purwanugraha, 2011). Aset tetap tersebut digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari. Pemerintah daerah harus mengelola anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah Pemerintah Daerah untuk memberikan kelancaran pelaksanaan pemerintah maupun untuk fasilitas publik, sehingga manfaat belanja modal dapat dinikmati oleh masyarakat.

Penelitian Hidayat (2013) menyebutkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan tahun lalu, efektifitas PAD tahun lalu, tingkat pembiayaan SiLPA tahun lalu, dan rasio ruang fiskal tahun lalu berpengaruh terhadap belanja modal. Besarnya ketergantungan daerah terhadap transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat atau kecilnya PAD yang dapat dipungut, akan membatasi ruang gerak dan kemampuan daerah itu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga daerah harus dapat membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah

pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi pada belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan daerah.

SiLPA dapat digunakan untuk kegiatan atau program pemerintah dan juga dapat dialokasikan untuk belanja seperti pembangunan infrastruktur yang dapat menciptakan kesejahteraan rakyat. Penelitian Dodik dan Kusnandar (2009) menunjukkan bahwa SiLPA tahun sebelumnya berpengaruh terhadap alokasi belanja tahun berikutnya. Sejalan dengan hasil penelitian Hidayat (2013) yang menunjukkan bahwa SiLPA tahun lalu berpengaruh terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya. SiLPA tahun lalu merupakan sumber penerimaan pembiayaan di tahun berikutnya untuk membiayai defisit anggaran tahun tersebut. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting karena di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal dengan baik agar terpenuhi semua kebutuhan masyarakat.

Belanja modal adalah salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan demi kelancaran aktivitas pemerintahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, belanja modal merupakan salah satu pengeluaran yang menjadi sorotan publik. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mencoba mengidentifikasi pengaruh Ketergantungan Daerah, Efektifitas Pendapatan, Derajat Kontribusi BUMD, Efisiensi Pendapatan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap variasi Belanja Modal di lingkungan pemerintah daerah.

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori keagenan

Teori agensi (*agency theory*) atau biasa disebut *contracting theory*, merupakan salah satu aliran riset akuntansi. Asumsinya adalah individu bertindak demi kepentingannya sendiri. Asumsi lainnya meyebutkan bahwa entitas merupakan tempat atau titik pertemuan bagi berbagai jenis hubungan kontraktual yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditor, dan pemerintahan (Bastian, 2006). Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau

organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agent) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (Halim dan Abdullah, 2006). Berdasarkan konsep hubungan prinsipal-agen (*The Principal-Agent Theory*), dikenal pemisahan antara rakyat umum yang memiliki kedaulatan (melalui lembaga perwakilan, prinsipal) dan sekelompok kecil anggota masyarakat yang diamanatkan untuk menyelenggarakan kedaulatan (pemerintah, agen). Penerapan teori keagenan dapat menimbulkan konflik di antara prinsipal dan agen tersebut, karena prinsipal tidak selalu mudah mengakses atau mengetahui secara faktual apa yang dilakukan oleh pihak agen sehingga dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak optimal. Sebaliknya, agen sebagai pihak yang seharusnya membatasi tindakannya pada hal-hal yang menguntungkan pihak prinsipal justru memiliki kekuasaan untuk mengutamakan kepentingannya secara berlebihan karena berada pada posisi yang terlindung dari sorotan mata langsung pihak prinsipal sehingga dapat menjurus pada tindakan penyalahgunaan wewenang (*moral hazard problem*) (Aritonang, 2009).

Hubungan Teori Keagenan dengan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Beberapa aturan secara eksplisit merupakan manifestasi dari teori keagenan adalah:

1. UU 22/1999 dan UU 32/2004 yang diantaranya mengatur bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif yang dipilih dan diberhentikan oleh legislatif (UU 22/1999) atau diusulkan untuk diberhentikan (UU 32/2004) merupakan bentuk pengimplementasian prinsip-prinsip hubungan keagenan di pemerintahan. Eksekutif akan membuat pertanggungjawaban kepada legislatif pada setiap tahun atas anggaran yang dilaksanakannya dan setiap lima tahun ketika masa jabatan kepala daerah berakhir.
2. PP 109/2000 menjelaskan tentang penghasilan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. PP 110/2000, PP 24/2000, dan PP 37/2005 mengatur mengenai kedudukan keuangan anggota legislatif.

4. UU 17/2003, UU 1/2004, dan PP 37/2005 mengatur mengenai kedudukan keuangan anggota legislatif.
5. UU 17/2003, UU 1/2004, dan UU 15/2004 merupakan aturan yang secara tegas mengatur bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan pemeriksaan keuangan publik (negara dan daerah) dilaksanakan oleh pemerintah.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak, yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Halim dan Abdullah, 2006).

Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

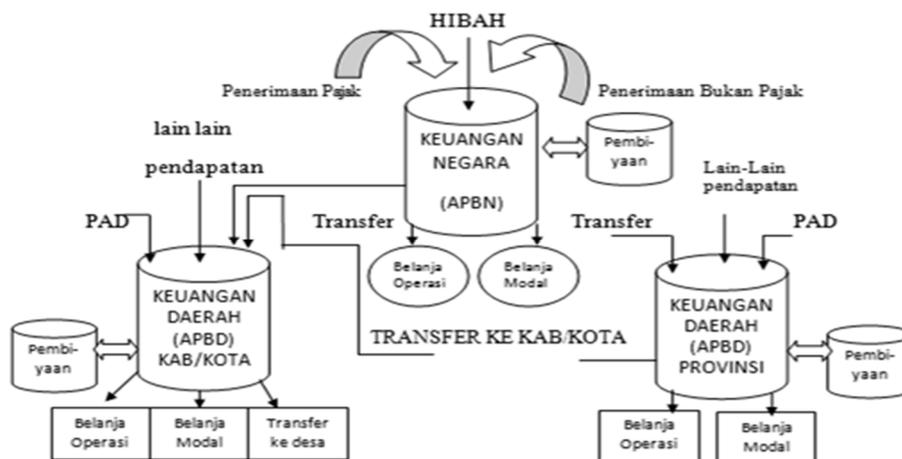
Seperti dikemukakan oleh Rondinelli, Mccullough dan Johnson (1989) dalam Bastian, 2005, secara teoritis, kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri anggaran pengeluaran rutin dan pembangunan, merupakan salah satu tolak ukur utama dalam menilai kualitas otonomi yang dimiliki. Atau dengan kata lain, semakin besar kontribusi pendapatan daerah sendiri terhadap anggaran belanja daerah, maka kualitas otonomi daerah akan semakin tinggi. Demikian juga sebaliknya, bila semakin besar 'subsidi' pemerintah pusat terhadap anggaran belanja daerah, maka akan mengakibatkan semakin meningkatkan 'ketergantungan' pemerintah daerah terhadap pusat, yang pada akhirnya akan memperlemah eksistensi otonomi daerah. Argumen teoritis seperti ini secara eksplisit menunjukkan pentingnya meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam menopang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Bab VI UU No.17 Tahun 2013 mengatur hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelola dana masyarakat. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah terjadi dalam bentuk:

1. Pengalokasian transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian.
2. Pemberian pinjaman dan/atau hibah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau sebaliknya dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

3. Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal oleh pemerintah pusat kepada perusahaan daerah atau sebaliknya pemberian pinjaman/hibah oleh perusahaan daerah kepada pemerintah pusat.
 4. Pemberian pinjaman/hibah oleh perusahaan negara kepada pemerintah daerah.
- Hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui dana transfer dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah



Sumber: Mahmudi (2011)

Aliran keuangan dari pemerintah pusat ke daerah sebenarnya tidak hanya melalui transfer pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan saja, tetapi juga melalui belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh Kementerian/lembaga maupun nonkementerian/lembaga yang dilaksanakan oleh atau di daerah. Belanja pemerintah pusat yang mengalir ke daerah tidak masuk dalam komponen APBD. Hal ini berbeda dengan transfer pemerintah pusat ke daerah yang masuk dalam komponen APBD. Belanja pemerintah pusat melalui anggota kementerian/lembaga yang dilakukan di daerah terkait dengan penyelenggaraan asasi desentralisasi dan tugas pembantu, Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh kantor vertikal di daerah, penyelenggaraan program Nasional kewenangan bersama misalnya program PNPM, BOS, Jamkesmas, dan sebagainya. Selain itu terdapat juga belanja pemerintah pusat yang mengalir ke daerah yang anggarannya dikelola langsung oleh Menteri Keuangan tetapi kegiatannya dilakukan oleh Kementerian/lembaga yaitu berupa penyaluran subsidi.

Pengukuran Kinerja

Kinerja (Performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*Performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Elemen pokok suatu pengukuran kinerja antara lain:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi
2. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
3. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi dan
4. Evaluasi kinerja

Pengukuran kinerja bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadi peningkatan kinerja. Jika organisasi sudah merumuskan dan menetapkan perencanaan strategi, program, dan juga anggaran maka tahap selanjutnya tentunya adalah implementasi. Untuk menilai ketercapaian implementasi tersebut dibutuhkan sistem pengukuran kinerja yang dapat membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi baik melalui alat ukur finansial maupun nonfinansial. Hasil pengukuran kinerja dijadikan umpan balik untuk tahun berikutnya baik dalam perencanaan maupun implementasi. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah, dasar pengalokasian sumberdaya dan pembuatan keputusan, dan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (

Analisis Rasio Keuangan

Pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan data dan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Laporan yang dipublikasikan bersifat umum. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Agar laporan keuangan lebih bermakna dan bermanfaat untuk pertimbangan pembuatan keputusan serta untuk pengukuran dan evaluasi kinerja maka laporan keuangan perlu dianalisis (Mahmudi,2011). Salah satu alat untuk

menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Penelitian Terdahulu

Dodik dan Kusnandar (2009) melakukan penelitian dengan judul pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Kabupaten Siak dan Kabupaten Penajam Paser Utara tidak memiliki Dana Alokasi Umum sehingga di keluarkan dari sampel. Sampel dalam penelitian ini ada 292, dengan rincian 231 kabupaten dan 61 kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif signifikan dalam pengalokasian belanja modal, luas wilayah berpengaruh positif signifikan dalam pengalokasian belanja modal.

Pada penelitian Hidayat (2013) meneliti tentang analisis pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal. Dalam penelitian ini mengambil sampel 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur tahun 2008 -2012. Penelitian menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan tahun lalu berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal, semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah pada tahun lalu maka semakin rendah alokasi belanja modal untuk tahun berikutnya. Efektifitas PAD tahun lalu berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal, semakin besar efektifitas atau pencapaian target PAD tahun lalu maka alokasi belanja modal tahun berikutnya juga semakin besar. Tingkat

pembiayaan SiLPA tahun lalu berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal, semakin besar tingkat pembiayaan SiLPA tahun lalu maka semakin besar pula alokasi belanja modal di tahun berikutnya. Ruang fiskal tahun lalu berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal, semakin besar rasio ruang fiskal tahun lalu maka semakin besar pula alokasi belanja modal di tahun berikutnya.

Ardhini (2011) melakukan penelitian dengan judul pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik dalam perspektif teori keagenan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio Kemandirian Daerah tahun sebelumnya berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah realisasi Belanja Modal untuk pelayanan publik, efektivitas keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah realisasi belanja modal untuk pelayanan publik, efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah realisasi belanja modal untuk pelayanan publik, SiLPA berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah realisasi belanja modal untuk pelayanan publik.

Sularso dan Restianto (2011) meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Populasi pada penelitian ini seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota. Seluruh Kabupaten/Kota dijadikan sampel dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2006-2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan dengan belanja modal memiliki ketergantungan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, kemandirian keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, efektivitas PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, derajat kontribusi BUMD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Aprizay, Darwanis, dan Arfan (2014) meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap pengalokasian belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode sensus, dimana populasi penelitian adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2010-2012, dimana Provinsi Aceh terdapat 23 pemerintahan daerah yang terdiri dari 18 pemerintahan kabupaten dan 5 pemerintahan kota. Selanjutnya dari 23 Kabupaten/Kota akan diamati selama 3 periode sehingga jumlah pengamatan sebanyak 69 pengamatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara PAD, dengan Belanja Modal. Diperoleh pengaruh yang negatif antara PAD dengan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Artinya bila PAD meningkat 1%, maka Belanja Modal akan menurun sebesar 175%.

Hubungan antara DAPER dengan Belanja Modal diperoleh pengaruh yang negatif antara DAPER dengan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Artinya bila DAPER meningkat 1%, maka Belanja Modal akan turun sebesar 42,4%. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Belanja Modal, pengaruh yang dihasilkan yaitu positif. Artinya bila SiLPA meningkat 1% maka Belanja Modal juga naik sebesar 47,3%. Selanjutnya hasil penelitian komponen Dana Perimbangan yang meliputi DBHP (Dana Bagi Hasil Pajak), DBHBP (Dana Bagi Hasil Bukan Pajak), DAU (Dana Alokasi Umum), dan DAK (Dana Alokasi Khusus) berpengaruh secara bersama terhadap Belanja Modal dengan nilai pengaruh 37,3%. Pengaruh yang dihasilkan tidak terlalu besar (<50%), namun derajat hubungan (korelasi) antara DBHP, DBHBP, DAU, dan DAK dengan belanja modal diperoleh nilai sebesar 61,1%.

Ethika dan Erlis (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Asli daerah dan Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Moderasi (studi pada pemerintah Kabupaten/Kota hasil pemekaran daerah di Pulau Sumatera). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, variabel sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, variabel pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, variabel dana alokasi umum (LnDAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, variabel luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota hasil pemekaran daerah di Pulau Sumatera. Variabel interaksi pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan asli daerah (LnPE_PAD) memiliki nilai β (-0,104) dan nilai signifikansi 0,092 lebih besar dari α (0,05). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/ Kota hasil pemekaran daerah di Pulau Sumatera.

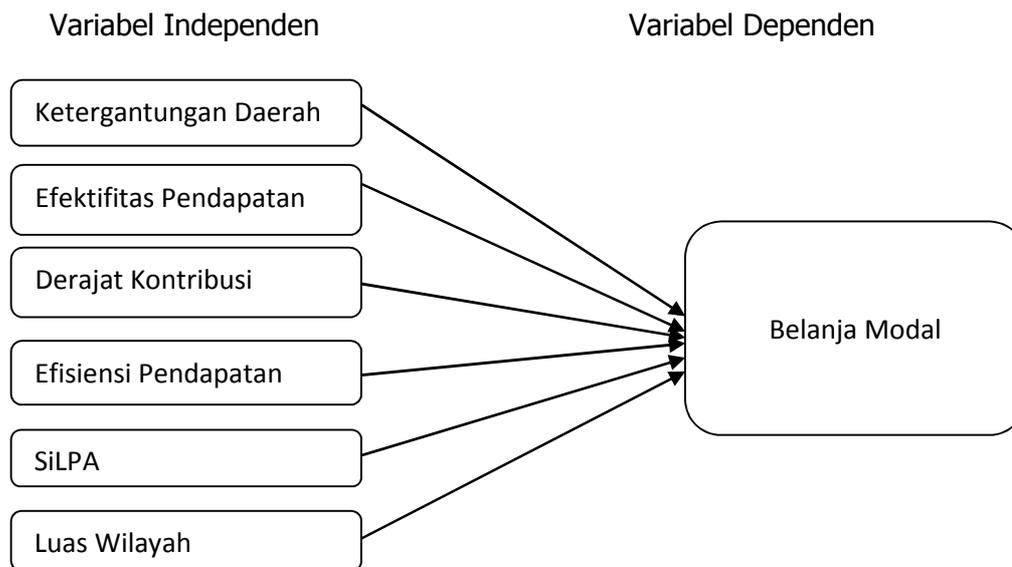
Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi belanja modal. Berikut ini merupakan kerangka pemikiran yang menggambarkan model penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Gambar 2

Kerangka Pemikiran





Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Ketergantungan Daerah Terhadap Belanja Modal

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh peneriman daerah dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2011). Rasio ketergantungan daerah menggambarkan bahwa seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin (Soesastro dkk, 2005).

Semakin besar kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangannya, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut mengurus rumah tangganya sendiri, khususnya dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Besarnya ketergantungan daerah terhadap transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat atau kecilnya PAD yang dapat dipungut, akan membatasi ruang gerak dan kemampuan daerah itu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga daerah harus dapat membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya adalah memberikan proporsi pada belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan daerah.

Dalam penelitian Hidayat (2013) menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diprosikan oleh tingkat ketergantungan daerah tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya. Sejalan dengan penelitian Sularso dan Restianto (2011) pengalokasian belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan khususnya rasio ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, dan derajat kontribusi BUMD. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Ketergantungan Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pengaruh Efektifitas Pendapatan Terhadap Belanja Modal

Efektifitas dalam suatu organisasi merupakan tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Efektifitas dapat dikatakan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu telah ditentukan. Dalam sektor publik, Efektifitas PAD menunjukkan suatu kondisi dimana daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan memanfaatkannya secara memadai untuk membiayai aktifitas dalam urusan otonomi. Rasio Efektivitas Pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan (Mahmudi, 2011). Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan pemerintah dalam pengelolaan PAD dikategorikan sangat efektif bila mencapai rasio minimal 100%. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD maka dikatakan semakin efektif ini juga berarti bahwa pemerintah daerah mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk kebutuhan masyarakat yang dialokasikan melalui belanja modal.

Pada penelitian Ardhini (2011) Rasio Efektifitas keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik. Sehingga apabila efektifitas keuangan daerah cenderung lebih efektif, hal ini berpengaruh terhadap jumlah belanja modal untuk pelayanan publik. Sejalan dengan penelitian Hidayat (2013) yang menunjukkan bahwa efektifitas PAD tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Efektivitas Pendapatan berpengaruh terhadap Belanja Modal

Pengaruh Derajat Kontribusi BUMD dan Belanja Modal

Derajat Kontribusi BUMD dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan pemerintah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan (Mahmudi, 2011). Pemerintah daerah dapat melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi peran BUMD. Kontribusi BUMD dapat menjadi salah satu potensi sumber keuangan daerah yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Semakin besar kontribusi BUMD dalam Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi indikator bahwa pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya dengan baik.

Oleh karena itu pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran dalam bentuk belanja modal yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian Sularso dan Restianto (2011) menunjukkan bahwa pengalokasian belanja modal dipengaruhi oleh kinerja keuangan salah satunya adalah derajat kontribusi BUMD. Semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah maka semakin tinggi alokasi belanja modalnya. Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃: Derajat Kontribusi BUMD berpengaruh terhadap Belanja Modal

Efisiensi Pendapatan dan Belanja Modal

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Semakin kecil rasio efisiensi maka menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah semakin baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah semakin cermat mengeluarkan biaya untuk merealisasikan pendapatannya. Semakin tinggi pendapatan yang berhasil direalisasikan akan semakin dapat memenuhi kebutuhan belanja masyarakat seperti belanja modal yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan demi kelancaran aktivitas masyarakat.

Ardhini (2011) meneliti tentang pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik menunjukkan bahwa variabel efisiensi pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap jumlah realisasi belanja modal untuk pelayanan publik. Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄: Efisiensi Pendapatan berpengaruh terhadap Belanja Modal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Belanja Modal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Selisih antara penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran disebut surplus atau defisit. Surplus terjadi ketika penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. SiLPA dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pengeluaran pemerintah.

SiLPA dapat digunakan untuk kegiatan atau program pemerintah dan juga dapat dialokasikan untuk belanja seperti pembangunan infrastruktur yang dapat menciptakan kesejahteraan rakyat. Belanja modal adalah salah satu langkah pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Pada penelitian Dodik dan Kusnandar (2009) menunjukkan bahwa SiLPA tahun sebelumnya berpengaruh terhadap alokasi belanja tahun berikutnya. Sejalan dengan hasil penelitian Hidayat (2013) yang menunjukkan bahwa SiLPA tahun lalu berpengaruh terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya. SiLPA tahun lalu merupakan sumber penerimaan pembiayaan di tahun berikutnya untuk membiayai defisit anggaran tahun tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₅: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal

Luas Wilayah dan Belanja Modal

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas. Pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ekonomi dan investasi seperti ketersediaan sistem jaringan listrik, air, telekomunikasi, transportasi, pasar, dll, serta pembangunan sarana dan prasarana sosial seperti sekolah dan pusat kesehatan (Kusumah dan Emhas, 2012). Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting karena di dalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Oleh karena itu,

pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal dengan baik agar terpenuhi semua kebutuhan masyarakat.

Pada penelitian Dodik dan Kusnandar (2009) luas wilayah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal, hal ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja modal yang dilakukan oleh daerah sangat dipengaruhi oleh luas daerah itu sendiri. Luas wilayah suatu daerah dapat dijadikan ukuran suatu daerah untuk mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan terutama berupa pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jaringan. Berdasarkan pemaparan tersebut penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₆: Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2011). Penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti bersifat sebab dan akibat (kausal), sehingga dalam penelitian ini terdapat *variabel independen* (Penyebab) dan *variabel dependen* (Akibat). Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Ketergantungan Daerah, Efektifitas Pendapatan, Derajat Kontribusi BUMD, Efisiensi Pendapatan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal.

Maka dapat disimpulkan metode ini bertujuan untuk menggambarkan benar tidaknya fakta-fakta yang ada serta menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dengan menggunakan statistik sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan benar atau tidak.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang terdapat pada seluruh provinsi di Indonesia. Terdapat 399 kabupaten dan 98 kota di Indonesia. Provinsi dikecualikan dalam populasi dengan pertimbangan adanya ketidaksetaraan wewenang dan sifat hubungan antara pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2012. Teknik sampling yang digunakan adalah *Probability Sampling* dengan jenis *simple random sampling*. *Probability*

Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota. *Simple random sampling* (penyampelan acak sederhana) merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari perbedaan pengertian dan memberikan batasan yang tegas pada variabel yang diteliti, maka definisi operasional terhadap masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Variabel Independen

1. Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan bahwa seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Ketergantungan Daerah dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total pendapatan}} \times 100$$

Pendapatan Transfer dalam penelitian ini adalah transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat-lainnya, transfer pemerintah provinsi yang terdapat pada laporan realisasi APBD tahun 2012.

2. Efektivitas Pendapatan

Efektivitas Pendapatan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Efektivitas Pendapatan dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, Efektivitas Pendapatan membandingkan realisasi pendapatan yang terdapat dalam APBD terhadap target penerimaan pendapatan yang terdapat dalam APBD yang dianggarkan tahun 2012.

3. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini menggambarkan tingkat kontribusi perusahaan dalam mendukung pendapatan daerah.

Derajat kontribusi BUMD dihitung dengan rumus:

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini penerimaan bagian laba BUMD diambil dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2012 dibandingkan dengan total pendapatan tahun 2012.

4. Efisiensi Pendapatan

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan.

Efisiensi Pendapatan dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi Pendapatan} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, biaya pemerolehan pendapatan dilihat dari biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012 dan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pendapatan tahun 2012.

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, "Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Dalam penelitian ini, SiLPA dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2012.

6. Luas Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Luas wilayah dalam penelitian ini adalah luas wilayah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Variabel Dependen

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk dijual Belanja modal dalam penelitian ini dilihat dari jumlah realisasi Belanja Modal yang terdapat di APBD tahun 2012.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Belanja modal, Total Pendapatan, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, SiLPA, dan Pendapatan Transfer diperoleh dari Laporan Realisasi APBD yang terdapat di Badan Pemeriksa Keuangan. Data Luas wilayah diperoleh dari web resmi Kementerian Dalam Negeri yang beralamatkan <http://depdagri.go.id>.

Metode Analisis Data

Statistik Deskriptif

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2013).

Model Regresi Linear Ganda

Data dianalisis dengan menggunakan analisa regresi linier berganda. Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Peneliti menggunakan analisis regresi ganda karena dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen (Sugiyono, 2013). Untuk mempermudah perhitungan dalam penelitian menggunakan alat bantu SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 21.

Rumus metode Regresi Linier Berganda adalah :

$$BM = \alpha + \beta_1 KD + \beta_2 EFEP + \beta_3 DKB + \beta_4 EFIP + \beta_5 SiLPA + \beta_6 LW + \varepsilon$$

Dimana :

BM = Belanja Modal

α = Konstanta

KD = Ketergantungan Daerah

EFEP = Efektifitas Pendapatan

DKB = Derajat Kontribusi BUMD

EFIP = Efisiensi Pendapatan

SiLPA = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

LW = Luas Wilayah

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

ε = Error

Sebelum melakukan uji hipotesis, sesuai dengan ketentuan bahwa dalam uji regresi linier berganda harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu agar penelitian untuk menguji

kesalahan model regresi yang digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah Uji Normalitas, Multikolinieritas, dan Heteroskedastisitas.

Metode Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis adalah cara untuk menguji hipotesa tertentu yang akan diajukan. Dalam penggunaan alat uji regresi linear beranda terdapat beberapa analisis yang digunakan yaitu sebagai berikut:

a. Uji Statistik F (Signifikansi Simultan)

Uji Statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Uji signifikansi simultan dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Jika tingkat signifikan dibawah 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependennya atas semua variabel independennya secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisis data digunakan menggunakan bantuan program SPSS.

Formulasi Hipotesis:

Ho: tidak berpengaruh

Ha: mempunyai pengaruh

b. Uji Statistik t (Signifikansi Parameter Individual)

Uji signifikansi parameter individual menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Apakah tingkat signifikan dibawah 0,05, maka secara individual variabel independen memengaruhi variabel dependen.

Fungsi Hipotesis:

Ho : tidak berpengaruh

Ha : mempunyai pengaruh

c. Uji R² (Koefisien Determinan)

Uji koefisien determinan bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang terdapat pada seluruh provinsi di Indonesia. Terdapat 399 kabupaten dan 98 kota di Indonesia. Provinsi dikecualikan dalam populasi dengan pertimbangan adanya ketidaksetaraan wewenang dan sifat hubungan antara pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi APBD di Badan Pemeriksa Keuangan dan data luas wilayah dari web resmi Kementerian Dalam Negeri. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *Probability Sampling* dengan jenis *simple random sampling*. Menurut Sugiyono (2013) *Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota. *Simple random sampling* (penyampelan acak sederhana) merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Sampel yang dapat diproses dalam penelitian ini adalah 176 sampel pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2013). Deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai minimum, nilai maksimum, mean (rata-rata), dan standar deviasi dari enam variabel independen yaitu ketergantungan daerah, efektifitas pendapatan, derajat kontribusi BUMD, efisiensi pendapatan, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan luas wilayah sebagai variabel yang memengaruhi belanja modal. Data utama yang diperoleh untuk penelitian ini adalah data Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan sampel yang diproses dalam penelitian ini sebanyak 176. Hasil statistik deskriptif dari data penelitian sebagai berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KETERGANTUNGAN_DAERAH	176	.27	.99	.8882	.09251
EFEKTIVITAS_PENDAPATAN	176	.82	1.44	1.0264	.07357
DERAJAT_BUMD	176	.00003	.04469	.0057034	.00647780
EFISIENSI_PENDAPATAN	176	.000026	.110000	.01622501	.020911626
SILPA	176	1.067.971.108,81	984.224.665.347,43	139.665.873.435,0044	189.698.930.623,35638
LUAS_WILAYAH	176	16.06	42620.70	3671.8573	5358.77286
BELANJA_MODAL	176	5.362.920.400.00	1.045.781.634.734.00	206.815.462.674.6316	176.050.158.152.53240
Valid N (listwise)	176				

Variabel ketergantungan daerah memiliki nilai minimum sebesar 0,27 dan nilai maksimum sebesar 0,99. Dapat dilihat pula pada tabel diatas nilai mean (rata-rata) untuk variabel ketergantungan daerah sebesar 0,8882, hal ini menunjukkan bahwa terdapat 105 Kabupaten/Kota diatas nilai rata-rata dan 71 Kabupaten/Kota dibawah nilai rata-rata dengan standar deviasi sebesar 0,9251. Variabel efektifitas pendapatan memiliki nilai minimum sebesar 0,82 dan nilai maksimum sebesar 1,44. Sedangkan nilai rata-rata efektifitas pendapatan sebesar 1,0264 hal ini menunjukkan bahwa terdapat 58 Kabupaten/Kota diatas nilai rata-rata dan 118 Kabupaten/Kota yang dibawah nilai rata-rata dengan standar deviasi sebesar 0,07357. Variabel derajat kontribusi BUMD memiliki nilai minimum sebesar 0,00003 dan nilai maksimum sebesar 0,04469. sedangkan nilai rata-rata tingkat kontribusi BUMD sebesar 0,0057034 hal ini menunjukkan bahwa terdapat 158 Kabupaten/Kota diatas nilai rata-rata dan 18 Kabupaten/Kota yang dibawah nilai rata-rata dengan standar deviasi sebesar 0,00647780.

Variabel efisiensi pendapatan memiliki nilai minimum sebesar 0,000026 dan nilai maksimum sebesar 0,110000. Sedangkan nilai rata-rata efisiensi pendapatan sebesar 0,01622501 hal ini menunjukkan bahwa terdapat 159 Kabupaten/Kota diatas nilai rata-rata dan 17 Kabupaten/Kota yang dibawah nilai rata-rata dengan standar deviasi sebesar 0,020911626. Variabel sisa lebih pembiayaan memiliki nilai minimum sebesar Rp1.067.971.108,81 dan nilai maksimum sebesar Rp984.224.665.347,43. Sedangkan nilai rata-rata sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp139.665.873.435,0044 hal ini menunjukkan bahwa terdapat 47 Kabupaten/Kota diatas nilai rata-rata dan 129 Kabupaten/Kota yang dibawah nilai rata-rata dengan standar deviasi sebesar Rp189.698.930.623,35638.

Variabel luas wilayah memiliki nilai minimum sebesar 16,06 km² dan nilai maksimum sebesar 42620.70 km². Dapat dilihat pula dari tabel diatas nilai rata-rata luas wilayah sebesar 3671.8573 km² dengan standar deviasi sebesar 5358,77286 km². Variabel belanja modal

memiliki nilai minimum sebesar Rp5.362.920.400,00 dan nilai maksimum sebesar Rp1.045.781.634.734,00. Sedangkan nilai rata-rata belanja modal sebesar Rp206.815.462.674,6316, hal ini menunjukkan bahwa 70 Kabupaten/Kota berada diatas nilai rata-rata dan 106 Kabupaten/Kota berada dibawah nilai rata-rata dengan standar deviasi sebesar Rp176.050.158.152,53240.

PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui hubungan antara keenam variabel independen terhadap variabel dependen diuji dengan tiga uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan penelitian ini adalah uji R² (Koefisien Determinan), uji F (Signifikansi Simultan), uji t (Signifikansi parameter individual). Hasil uji hipotesis keenam variabel independen sebagai berikut :

Hasil Uji R² (Koefisien Determinan)

Uji koefisien determinan bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2009).

Tabel 2
Uji R² (Koefisien Determinan)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.557 ^a	.310	.285	.54971

a. Predictors: (Constant), LUAS_WILAYAH, EFEKTIVITAS_PENDAPATAN, DERAJAT_BUMD, EFISIENSI_PENDAPATAN, KETERGANTUNGAN_DAERAH, LN_SILPA

b. Dependent Variable: LN_BELANJA_MODAL

Hasil pengujian koefisien deteminasi menunjukkan bahwa Adjusted R Square sebesar 28,5%. Hal ini berarti 28,5% variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh 6 variabel independen yaitu Ketergantungan Daerah, Efektivitas Pendapatan, Derajat BUMD, Efisiensi Pendapatan, SiLPA, dan Luas Wilayah. Sedangkan sisanya (100% - 28,5% = 71,5%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

4.4.2 Hasil Uji F (Signifikansi Simultan)

Uji Statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel

dependen (Ghozali, 2009). Jika tingkat signifikan dibawah 0,1 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependennya atas semua variabel independennya secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 3
Uji F (Signifikansi Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22.917	6	3.820	12.640	.000 ^b
	Residual	51.068	169	.302		
	Total	73.985	175			

a. Dependent Variable: LN_BELANJA_MODAL

b. Predictors: (Constant), LUAS_WILAYAH, EFEKTIVITAS_PENDAPATAN, DERAJAT BUMD, EFISIENSI_PENDAPATAN, KETERGANTUNGAN_DAERAH, LN_SILPA

Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa F hitung sebesar 12,640 dan nilai signifikansi 0,000 atau dibawah tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ketergantungan daerah, efektifitas pendapatan, derajat BUMD, efisiensi pendapatan, SiLPA, dan luas wilayah secara bersama-sama dapat menjelaskan pengaruh terhadap variabel belanja modal.

Hasil Uji Statistik T (Signifikansi Parameter Individual)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012). Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel ketergantungan daerah, efektifitas pendapatan, derajat BUMD, efisiensi pendapatan, SiLPA, dan luas wilayah berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap belanja modal.

Perumusan Hipotesis:

Ho: Ketergantungan daerah, efektifitas pendapatan, derajat kontribusi BUMD, efisiensi pendapatan, SiLPA, dan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal

Ha: Ketergantungan daerah, efektifitas pendapatan, derajat kontribusi BUMD, efisiensi pendapatan, SiLPA, dan luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal

Pengambilan Keputusan :

- Apabila tingkat signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak artinya secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Apabila tingkat signifikansi > 0.05, maka Ho diterima artinya secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4
Uji Statistik T (Signifikansi Parameter Individual)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	24.244	1.401		17.304	.000
KETERGANTUNGAN_DAERAH	-2.097	.539	-.298	-3.888	.000
EFEKTIVITAS_PENDAPATAN	-.082	.643	-.009	-.128	.899
DERAJAT_BUMD	-1.567	6.501	-.016	-.241	.810
EFISIENSI_PENDAPATAN	-1.732	2.066	-.056	-.839	.403
LN_SILPA	.136	.047	.242	2.876	.005
LUAS_WILAYAH	4.253E-005	.000	.351	5.145	.000

a. Dependent Variable: LN_BELANJA_MODAL

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4 menunjukkan bahwa Variabel Ketergantungan Daerah memiliki koefisien sebesar -0,298 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, hal ini berarti variabel Ketergantungan Daerah signifikan pada level 5% dengan arah koefisien negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Rasio Ketergantungan Daerah berpengaruh negative secara signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel Efektifitas Pendapatan memiliki koefisien sebesar -0,009 dan nilai signifikan 0,899. Nilai signifikansi $0,899 > 0,05$, hal ini berarti variabel Efektifitas Pendapatan tidak signifikan pada level 5%. Sehingga dapat disimpulkan variabel Efektifitas Pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Variabel Derajat BUMD memiliki koefisien sebesar -0,016 dan nilai signifikan 0,810. Nilai signifikansi $0,810 > 0,05$, hal ini berarti variabel Derajat BUMD tidak signifikan pada level 5%. Sehingga dapat disimpulkan variabel Derajat BUMD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel Efisiensi Pendapatan memiliki koefisien sebesar -0,056 dan nilai signifikan 0,403. Nilai signifikansi $0,403 > 0,05$, hal ini berarti variabel Efisiensi Pendapatan

tidak signifikan pada level 5%. Sehingga dapat disimpulkan variabel Efisiensi Pendapatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah Belanja Modal.

Variabel SiLPA memiliki koefisien sebesar 0,242 dan nilai signifikan 0,005. Nilai signifikansi $0,005 < 0,05$, hal ini berarti variabel SiLPA signifikan pada level 5% dengan arah koefisien positif. Sehingga dapat disimpulkan variabel Efisiensi Pendapatan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Modal. Variabel Luas Wilayah memiliki koefisien sebesar 0,351 dan nilai signifikan 0,000. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, hal ini berarti variabel Luas Wilayah signifikan pada level 5% dengan arah koefisien positif. Sehingga dapat disimpulkan variabel Luas Wilayah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian variabel Ketergantungan Daerah, Efektifitas Pendapatan, Derajat BUMD, Efisiensi Pendapatan, SiLPA, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal dapat dilihat pada tabel ringkasan hipotesis berikut ini:

Tabel 5
Ringkasan Hipotesis

Dependen	Independen	Sig	T Hitung	T Tabel	Kesimpulan
Belanja Modal	Ketergantungan Daerah	0,000	-3,888	1,974	Hipotesis diterima
	Efektifitas Pendapatan	0,889	-0,128	1,974	Hipotesis ditolak
	Derajat Kontribusi BUMD	0,810	-0,241	1,974	Hipotesis ditolak
	Efisiensi Pendapatan	0,403	-0,839	1,974	Hipotesis ditolak
	SiLPA	0,005	2.876	1,974	Hipotesis diterima
	Luas Wilayah	0,000	5.145	1,974	Hipotesis diterima

Pengaruh Ketergantungan Daerah Terhadap Belanja Modal

Ketergantungan daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

daerahnya. Ketergantungan pemerintah daerah kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Ketergantungan Daerah berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Ketergantungan pemerintah daerah yang rendah terhadap pemerintah pusat menghasilkan daerah yang mampu mengelola dananya dengan baik sehingga pengalokasian dana ke belanja modal untuk kepentingan publik dapat terlaksana. Hal ini mungkin dikarenakan pendapatan transfer dari pemerintah pusat lebih kecil dari pendapatan daerah itu sendiri sehingga kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber keuangan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat lebih banyak.

Berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa Ketergantungan Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Ketergantungan Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal diterima. Pemerintah daerah mengupayakan peningkatan kemandirian daerahnya dengan tidak bergantung kepada pemerintah pusat, sehingga semakin besar kemampuan daerah dalam menggali pendapatan dan semakin besar pula kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri khususnya dalam memberikan pelayanan publik dengan mengalokasikan ke belanja modal. Arah hubungan ini bernilai negatif, menandakan bahwa jumlah ketergantungan daerah naik maka jumlah belanja modal akan menurun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayat (2013) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dengan nilai koefisien negatif, yang berarti jika tingkat ketergantungan naik, maka alokasi belanja modal akan turun. Hasil penelitian Sularso dan Restianto (2011) juga menjelaskan bahwa ketergantungan keuangan daerah yang rendah maka semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi, yang berarti bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah lebih baik, sehingga dapat mengalokasikan belanja modal lebih besar.

Hasil penelitian ini mendukung teori agensi yaitu setiap daerah bertindak demi kepentingan pemerintahannya. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki akses kekuasaan ekonomi yang besar dan berwenang atas pengalokasian sumber daya yang dimilikinya. Maka setiap pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggerakkan segala kemampuan yang dimiliki dalam menciptakan serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang dapat menjadi sumber pembiayaan di daerah. Sehingga program dan kegiatan

daerah untuk pengembangan kesejahteraan dapat terlaksana yang dapat diwujudkan dengan pengalokasian ke belanja modal.

Pengaruh Efektifitas Pendapatan Terhadap Belanja Modal

Efektifitas dapat dikatakan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas Pendapatan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Dalam hal ini, Efektifitas pendapatan menunjukkan suatu kondisi dimana daerah mampu menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan memanfaatkannya secara memadai untuk membiayai aktifitas dalam urusan otonomi.

Berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa efektifitas pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Efektifitas Pendapatan berpengaruh terhadap Belanja Modal ditolak. Hal ini mungkin dikarenakan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dialokasikan pada belanja modal tidak terlaksana karena tidak efektifnya pemerintah dalam mengelola sumber keuangan. Hal ini disebabkan karena jumlah realisasi penerimaan daerah lebih kecil dibandingkan jumlah target penerimaan daerah. Sebagai dasar rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan mempunyai target kinerja yang harus dicapai. Pencapaian target itu lah yang tidak berhasil untuk merealisasikan penerimaan daerah.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang menggali sumber-sumber keuangannya sehingga menyebabkan penerimaan daerah yang diperoleh lebih kecil dari yang ditargetkan. Di mana realisasi penerimaan daerah seharusnya dapat meningkatkan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat yang di alokasikan ke belanja modal. Tetapi hal itu tidak dapat terlaksana diakibatkan kecilnya pendapatan yang diterima daerah dengan target pendapatan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga pemerintah daerah tidak mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk kebutuhan masyarakat yang dialokasikan melalui belanja modal.

Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan penelitian Ardhini (2011) yang menyatakan bahwa Efektifitas Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik. Sehingga apabila efektivitas keuangan daerah cenderung lebih efektif, hal ini berpengaruh terhadap jumlah belanja modal untuk pelayanan publik. Dalam penelitian Sularso dan Restianti (2011) menyatakan bahwa efektifitas pendapatan berpengaruh terhadap belanja modal. Rasio efektifitas yang tinggi menunjukkan bahwa

kemampuan keuangan daerah menjadi lebih tinggi sehingga memungkinkan untuk mengalokasikan belanja modal lebih besar.

Penolakan atas hipotesis yang diajukan karena kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan pendapatan. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan tidak efektif karena tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pencapaian penerimaan pendapatan yang tidak melampaui target menggambarkan kurangnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Sehingga tidak terlaksananya tujuan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengalokasian ke belanja modal.

Pengaruh Derajat Kontribusi BUMD Terhadap Belanja Modal

Pemerintah daerah dapat melakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi peran BUMD . Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Kontribusi BUMD dapat menjadi salah satu potensi sumber keuangan daerah yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Derajat BUMD tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis 3 yang menyatakan bahwa Derajat Kontribusi BUMD berpengaruh terhadap Belanja Modal ditolak. Hal ini disebabkan karena peran BUMD dalam mendukung pendapatan daerah sangatlah minim. BUMD seharusnya dapat saling membantu dengan pemerintah daerah. Artinya pemerintah memberikan kontribusi dana ke BUMD, BUMD memberikan kontribusi ke pemerintah daerah dan membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat untuk kepentingan secara besama-sama. Pendapatan dari hasil perusahaan-perusahaan daerah itu seharusnya dapat dialokasikan ke belanja modal guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana demi menunjang aktivitas sehari-hari.

Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan penelitian Sularso dan Restianto (2011) yang menyatakan bahwa Derajat Kontribusi BUMD berpengaruh terhadap belanja modal. Derajat kontribusi BUMD yang tinggi menunjukkan kemampuan keuangan daerah menjadi lebih tinggi sehingga pengalokasian belanja modal lebih besar. Penolakan atas hipotesis yang diajukan adalah peranan BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sangat minim. Minimnya kontribusi BUMD terhadap penerimaan daerah mungkin dikarenakan kinerja BUMD yang buruk, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor baik dari internal maupun eksternal.

Kecilnya penerimaan daerah mengakibatkan tidak dapat melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa untuk masyarakat yang dialokasikan pada belanja modal.

Pengaruh Efisiensi Pendapatan Terhadap Belanja Modal

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Efisiensi Pendapatan tidak berpengaruh signifikan pada Belanja Modal. Hasil pengujian ini tidak mendukung hipotesis 4 yang menyatakan bahwa Efisiensi Pendapatan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini mungkin disebabkan karena pengeluaran pemerintah untuk memperoleh pendapatan lebih besar, dimana hal tersebut menyebabkan kurang efisiennya pengeluaran yang dilakukan pemerintah, sehingga penerimaan pendapatan yang semestinya dapat melebihi dari pengeluaran tidak dapat memenuhi kebutuhan belanja masyarakat seperti belanja modal yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan demi kelancaran aktivitas masyarakat.

Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan penelitian Ardhini (2011) yang menyatakan bahwa rasio Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh negatif namun signifikan terhadap alokasi belanja modal untuk pelayanan publik. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada rasio efisiensi keuangan daerah, maka jumlah belanja modal akan menurun.

Penolakan atas hipotesis yang diajukan adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memperoleh pendapatan. Hal ini mungkin terjadi karena dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menunjang pemungutan PAD. Sehingga pemerintah tidak dapat mengalokasikan dananya pada belanja modal yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana.

Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pengaruh SiLPA Terhadap Belanja Modal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pengeluaran pemerintah. Mahmudi (2010) menjelaskan apabila terjadi sisa anggaran pada akhir periode maka sisa anggaran dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan maupun belanja untuk tahun anggaran berikutnya. Jadi besarnya SiLPA akan memengaruhi tingkat belanja di tahun berikutnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis 5 yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal diterima. Dalam hal ini, pemerintah daerah telah berhasil menggunakan sisa lebih pembiayaan anggarannya untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah Kabupaten/Kota dengan dialokasikan ke belanja modal seperti pembangunan infrastruktur seperti yang telah dihimbau oleh Kementerian Keuangan agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk menandakan bahwa jika jumlah sisa lebih pembiayaan meningkat maka pengalokasian terhadap belanja modal juga meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardhini (2011) yang menyatakan bahwa Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal untuk pelayanan publik. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada SiLPA, maka akan meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik. Pada penelitian Hidayat (2013) Tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. nilai koefisien variabel yang positif menandakan adanya hubungan positif yang bermakna apabila tingkat pembiayaan SiLPA tahun lalu naik maka alokasi belanja modal tahun berjalan akan naik. Begitu pula dengan penelitian Ethika dan Erlis (2014) yang menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh terhadap Belanja Modal. Apabila terjadi peningkatan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) akan mengakibatkan terjadinya peningkatan belanja modal.

Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal

Luas Wilayah adalah luas ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Daerah dengan penduduk yang tidak padat, tetapi memiliki cakupan wilayah yang luas, membutuhkan pembiayaan yang besar. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Luas Wilayah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil pengujian ini berhasil mendukung hipotesis 6 yang menyatakan bahwa Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini terjadi dikarenakan wilayah yang luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti transportasi, rumah sakit, jaringan listrik, jaringan telepon, gas, air, dll. Sehingga anggaran belanja modal yang digunakan untuk peningkatan pelayanan publik dipengaruhi oleh luas wilayah itu sendiri. Arah hubungan ini bernilai positif, maka dapat dikatakan semakin luas wilayah daerah tersebut semakin besar jumlah belanja modal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dodik dan Kusnandar (2009) yang menyatakan bahwa luas wilayah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal, hal ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja modal yang dilakukan oleh daerah sangat dipengaruhi oleh luas daerah itu sendiri. Namun tidak sejalan dengan penelitian Ethika dan Erlis (2014) yang menyatakan bahwa luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penerimaan hipotesis yang diajukan karena wilayah yang luas membutuhkan pembiayaan daerah yang besar, dengan demikian pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas lebih banyak dan proporsi belanja modal lebih besar. Pemenuhan kebutuhan masyarakat sangatlah penting demi kelancaran aktivitas. melalui belanja modal yang merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk memberikan kelancaran pelaksanaan pemerintah maupun untuk fasilitas publik, sehingga manfaat belanja modal dapat langsung dinikmati oleh masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam pengelolaan keuangan daerah, salah satu pengeluaran yang menjadi sorotan publik adalah pengeluaran dalam bentuk belanja modal. belanja modal merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk memberikan kelancaran pelaksanaan pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Peningkatan pelayanan fasilitas sangat diharapkan terutama di sektor publik. Berdasarkan permasalahan yang ada pada penelitian ini dan hasil analisis data serta pembahasannya mengenai pengaruh ketergantungan daerah, efektifitas pendapatan, derajat kontribusi BUMD, efisiensi pendapatan, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan luas wilayah terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketergantungan Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal yang artinya naiknya rasio ketergantungan daerah maka menyebabkan turunnya jumlah belanja modal dalam APBD.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini disebabkan karena jumlah realisasi penerimaan daerah lebih kecil dibandingkan jumlah target penerimaan daerah sehingga penerimaan daerah tersebut tidak dapat dialokasikan ke belanja modal.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efisiensi Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini disebabkan karena peran BUMD dalam mendukung pendapatan daerah sangatlah minim sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak dapat terlaksana dengan tidak dialokasiannya ke belanja modal.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efisiensi Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, hal ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah untuk memperoleh pendapatan lebih besar sehingga penerimaan pendapatan yang semestinya dapat melebihi dari pengeluaran tidak dapat memenuhi kebutuhan belanja masyarakat seperti belanja modal.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran telah berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan pemerintah Kabupaten/Kota dengan dialokasikan ke belanja modal seperti pembangunan infrastruktur.
6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Luas Wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena anggaran belanja modal yang digunakan untuk peningkatan pelayanan publik dipengaruhi oleh luas wilayah itu sendiri.

Keterbatasan dan Saran Penelitian

Berikut ini adalah keterbatasan disertai saran yang dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu tahun periode penelitian yaitu tahun 2012. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menambah periode penelitian.
2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa *adjusted R square* sebesar 0,285 artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel belanja modal sebesar 28,5% sedangkan sisanya 71,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain yang tidak diujikan dalam penelitian ini.

3. Pemerintah daerah diharapkan untuk mendirikan perusahaan-perusahaan daerah yang dapat memberikan kontribusi berarti bagi Pendapatan Asli Daerah karena akan berdampak pada peningkatan alokasi belanja modal.
4. Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan pengoptimalan penerimaan daerah karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.
5. Pemerintah daerah diharapkan mengelola BUMD secara profesional sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan dan mampu menjalin kerjasama yang saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi Urbanus M. Socia Prihawantoro. 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: BPPT
- Ardhini. 2011. *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah)*. Jurnal Akuntansi. Universitas Indonesia
- Aritonang Baharuddin. 2009. *Orang Batak Memandang BPK: Kepustakaan Populer Gramedia*
- Aprizay, Darwanis, dan Arfan. *Pengaruh Pendapatan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. ISSN 2302-0164
- Bastian Indra. 2006. *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga
- Bastian Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Dodik dan Kusnandar. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi
- Ethika dan Erlis. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Daerah di Pulau Sumatera)*. Jurnal Universitas Bung Hatta
- Ghozali Imam. 2009. *Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi Dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim Abdul. Syukriy Abdullah. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan

- Hidayat Muhammad. 2010. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Timur)*. Jurnal Ilmiah. Universitas Jendral Soedirman
- Kusumah Mulyana dan Robikin Emhas, 2012. *Politik Otonomi Daerah Untuk Penguatan NKRI: Seven Strategic Studies*
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
- Mahsun Moh. Firma Sulistiyowati. Heribertus Andre Purwanugraha. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Nordiawan. Iswahyudi Sondi Putra. Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-undang No 55 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Pusat dan Daerah
- Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Priyatno, Dwi. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: ANDI
- Sidik dkk. 2002. *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Soesastro dkk. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Yogyakarta: Kanisus
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sularso dan Restianto. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Jurnal Media Riset Akuntansi. Vol.1 No. 2 Agustus 2011. ISSN 2088 -2106
- Tangklisan Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo
- Waspada Online. 2014, 23 Februari
- Www.ksap.org